

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri belasan ribu pulau yang tersebar luas dari sabang sampai merauke. Indonesia juga memiliki banyak keragaman mulai dalam ekologi, demografi, ekonomi, etnis dan budaya. Pemerintah Indonesia tentu sangat kewalahan dalam mengatur negaranya yang sangat luas ini agar tetap berjalan rukun dan damai. Belum lagi dalam menangani masalah yang sering melanda negara ini. Salah satu kasus yang sering kali terjadi adalah masalah yang menyangkut sektor ekonomi, yaitu tindak kecurangan baik di instansi pemerintah maupun swasta.

Instansi swasta maupun pemerintah saat mengelola keuangan tidak terlepas dari tindakan kecurangan. Indikasi terjadinya kecurangan dapat diketahui melalui pengungkapan penyajian pada laporan keuangan yang berbeda dari kondisi yang sebenarnya dan dilakukan secara sengaja oleh pelaku kecurangan dan tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal. Untuk mendeteksi kecurangan tersebut dibutuhkan seorang auditor, baik itu auditor eksternal maupun internal. Namun, dalam kasus kecurangan yang merugikan negara kinerja internal auditor pemerintah yang wajib menanganinya.

Internal auditor pemerintah merupakan pihak yang berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan kinerja keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, yang menjadi salah satu tujuan pengawasan keuangan adalah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi

pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah terus berusaha untuk meminimalisir tindak kecurangan yang ada. Berdasarkan hasil survei *Tranparancy International* (TI) yang merilis indeks korupsi pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke 90 dari 176 negara (<http://citizen6.liputan6.com/read/3012560/ini-peringkat-korupsi-di-indonesia-dari-172-negara-di-dunia>, diakses 6 Januari 2018). Hal ini menandakan bahwa transparansi di Indonesia masih rendah.

Beberapa tahun terakhir ini saja sudah banyak kasus yang terjadi menyangkut permasalahan hukum yang berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Tuntutan dari masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN tentu menghendaki adanya fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah salah satu instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan audit di Provinsi Bangka Belitung. Internal auditor BPKP merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki peran penting dalam rangka penegakan *good governance* terhadap akuntabilitas negara. BPKP sebagai internal auditor pemerintah juga berperan penting dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi.

Seorang internal auditor pemerintah saat melakukan pengawasan dituntut agar melaksanakan kinerja dengan baik karena tanggung jawabnya terhadap negara sangatlah besar. Menurut Mangkunegara (2011), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Gibson, *et.al.*, (2007), ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: 1) faktor individu yaitu kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang, 2) faktor psikologi yaitu: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja, dan 3) faktor organisasi yaitu struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan. Banyaknya kasus internal auditor yang menyampingkan faktor-faktor berhubungan dengan kinerja mengakibatkan kinerja internal auditor turun sehingga kepercayaan publik pun menurun.

Maka dari itu, untuk memperbaiki kinerja internal auditor yang menurun tersebut sebaiknya dimulai dengan membangun komitmen organisasi yang baik. Wibowo (2015:188) mengatakan bahwa komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta kesediaan orang untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. Semakin tinggi komitmen organisasi seseorang maka akan berdampak selalu meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian kinerja internal auditor pun akan maksimal dan tidak lambat.

Selain komitmen organisasi, profesionalisme juga dapat meningkatkan kinerja internal auditor. Menurut Baotham (2007) profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai seorang internal auditor maka dalam melaksanakan tugas audit, internal auditor harus berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2011. IAPI 2011 menjelaskan 4 karakter lain yang harus dipunyai oleh auditor yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan. Adanya kode etik profesi akan membatasi tindakan dan sikap auditor untuk selalu ada dijalur yang benar dan tidak memanfaatkan profesinya demi keuntungan dirinya dan kode etik sebagai panutan untuk auditor perilaku untuk bertindak etis (Putri, 2015).

Disamping itu, perilaku etis juga sangat diperlukan seorang internal auditor. Perilaku etis berkaitan dengan tingkah laku perbuatan seseorang yang dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dalam kaitannya dengan etika profesi, perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika profesi tersebut. Diharapkan auditor berperilaku etis dalam menjalankan profesinya dan berdampak positif pada kinerjanya.

Selain itu juga ada faktor lain yang meningkatkan kinerja internal auditor, yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan kerja juga sangat penting bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Jika kepuasan kerja dapat terpenuhi tentunya auditor akan dapat memberikan kinerja yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Profesionalisme, dan Perilaku Etis terhadap Kinerja Internal Auditor dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel *Intervening* Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan menguraikan pengaruh komitmen organisasi, profesionalisme dan perilaku etis terhadap kinerja internal auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel *intervening* pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Apakah komitmen organisasi, profesionalisme dan perilaku etis berpengaruh terhadap kinerja internal auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel *intervening* di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi, profesionalisme dan perilaku etis terhadap kinerja internal auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel *intervening* di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan eksistensi pengetahuan mengenai pengaruh komitmen organisasi, profesionalisme dan perilaku etis terhadap kinerja internal auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel *intervening* pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai acuan untuk mengevaluasi praktik kinerja internal auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja internal auditor.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya menguji dan menganalisis masalah pada pengaruh komitmen organisasi, profesionalisme dan perilaku etis terhadap kinerja internal auditor dengan kepuasan kerja sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini hanya difokuskan pada internal auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian ini.

